

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdul Kadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Abdul Razak. 2021. Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Hukum Administrasi Negara. Penerbit Litera. Yogyakarta.
- Adrian Sutedi. 2019. Hukum Perizinan; Dalam Sektor Pelayanan Publik. Sinar Grafika. Jakarta.
- Amelia Cahyadini, Zainal Muttaqin, dan Anindya Saraswati Ardiwinata. 2023. Hukum Pengawasan. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Aminuddin Ilmar. 2023. Perbuatan Hukum Pemerintahan. Phinatama Media. Jakarta.
- A.M. Yunus Wahid. 2020. Pengantar Hukum Lingkungan. Prenada Media Group. Jakarta.
- Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih. 2016. Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
- Chairilhuda. 2011. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menunjuk Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Kencana. Jakarta.
- Cekli Satya Pratiwi. 2016. Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Jakarta;LeIP. Jakarta.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum. Refika Aditama. Bandung.
- Eny Kusdarini. 2019. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara. UNY Press. Yogyakarta.
- Hans Kelsen. 2007. *General Theory Of Law and State*. BEE Media Indonesia. Jakarta.
- Irwansyah. 2021. Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penelitian Artikel. Mira Buana Media. Yogyakarta.
- Joni Laksito dan Dyah Listyarini. 2023. Hukum Perizinan. Yayasan Prima Agus Teknik dan Universitas STEKOM. Semarang.
- Marbun S.F. 2014. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak. FH UII Press. Yogyakarta.
- Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram *University* Press. Mataram.
- Ridwan HR. 2018. Hukum Adminitrasi Negara. Rajawali Pers. Depok.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2009. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis. Rajawali Press. Jakarta.
- Suharsimi Arikunto. 2013. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta. Jakarta.

JURNAL

- Arini Nur Annisa. Mutiah Wenda Juniar. Rismawati Nur. Muh Ramadhansyah Prasetya. 2022. "Government Supervision Of The Right Fulfillment Of Housed Workers In The Transition Period". Awang Long Law Review. Vol. 5 No.1. Samarinda.
- Heru Laksono. Avrilya Iqoranni Susilo. Zamharira Muslim. Lisma Ningsih. Tedy Febriyanto. 2023. "Implementasi Standar Pelayanan Apotek Dan Faktor Yang Berhubungan Di Kota Bengkulu". Jurnal Ilmiah Avicenna. Vol. 18 No. 3. Bengkulu.
- Ika Lenaini. 2021. "Teknik Pengambilan Sampel *Purposive* dan *Snowball Sampling*". Jurnal Historis. Vol. 6 No. 1. Palembang.
- Kristy Anita. Heru Kuswanto. 2022. "Kepastian Hukum Pelaksanaan Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 Terhadap Perpanjangan Izin Apotek". Jurnal Yustisia Merdeka. Vol. 8 No. 1. Surabaya.
- Nurul Listiyani. Muzahid Akbar Hayat. Subianta Mandala. 2018. "Penormaan Pengawasan Izin Lingkungan Dalam Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam". Media Hukum. Vol. 25 No. 2. Banjarmasin.
- Rifqi Maulana. Achmad Sodik. 2022. "Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan". Jurnal Justisia. Vol. 7 No. 1. Banda Aceh.

ARTIKEL LAINNYA

- Rusadi Kanta Prawira. 1998. "Hukum dan Kekuasaan". Makalah. Universitas Islam Indonesia. Jogjakarta.
- Majalah Farmasetika. 2021. "Dampak Permohonan Surat Izin Apotek Pakai Syarat NIB Bagi Apoteker". (diunduh 03 Agustus 2025). Bandung

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang—Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.
- Peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek.
- Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar

Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bernasis Risiko Sektor Kesehatan.

Peraturan Walikota Makassar Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan

Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan.